

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamanat Samosir. (2014) *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- Dr. Sahnian, S.H., M.Hum.(2018). *hukum agrarian Indonesia edisi revisi*, Setara Press.
- Elfrida.R.Gultom. (2014). *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta
- Efendi Perangin, (1991). *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H. Muchsin. (2005). *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Harsono, B. (2002). *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan: Jakarta.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Jakarta.
- Iman Soetikinjo,(1994). *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.Soersono. (2009). *Tata cara dan proses persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- S. T. Kansil, (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Santoso, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia*, Cet. 3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Salim H. S.(2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul sitorus .(2018). *upaya hukum dalam perkara perdata*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, (2014). *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada.
- Sudharyo Soimin, (2001). *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Su Priadi, (2007). *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Urip Santoso, (2010). *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

A Nadya, (2024). "*Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Terlantar*," Jurnal Litigasi UNPAS.

Nurnaningsih Amriani, (2023). "*Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*," jurnal hukum dan pembangunan.

Rusmadi Murad, (2020). "*Konflik Tanah dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*," jurnal agrarian & tata ruang/national land agency.

RP Anggriawan, (2021). "*Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU*," Jurnal Marcapada.

VS Parihah, (2022). "*Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar*," Jurnal Al-Jurist.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta perubahannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Putusan Pengadilan

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2013/PTUN-JKT.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/B/2014/PT.TUN.JKT.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 409/K/TUN/2014.
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor 126/PK/TUN/2016.